

Dampak Dualisme Otonomi Daerah: Pengurangan Kemiskinan Jangka Panjang vs Peningkatan Jangka Pendek di Provinsi Bali, Indonesia: Analisis VECM

Lisa Nursita^{*1}, Retno Fitrianti²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 56, Samata-Gowa

²Universitas Hasanuddin, Indonesia

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar

*Correspondence: lisa.nursita@uin-alauddin.ac.id

[diterima 20-06-2025: revisi 21-10-2025: diterbitkan 31-12-2025]

ABSTRAK

Studi ini menganalisis dinamika kompleks antara otonomi daerah dan kemiskinan di Bali, Indonesia (2002–2024), dengan menguji hipotesis bahwa desentralisasi dapat mengurangi kemiskinan meskipun terdapat keterbatasan kapasitas institusional. Menggunakan data kuartalan, kami menerapkan Model Regresi Vektor (VAR) dan Model Koreksi Kesalahan Vektor (VECM) untuk menganalisis interaksi jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang antara otonomi fiskal (diukur dengan rasio pendapatan lokal terhadap anggaran) dan kemiskinan multidimensi. Pemilihan lag mengikuti kriteria ketat (AIC, SC, HQ), dengan pemeriksaan diagnostik untuk stabilitas (akar AR) dan kausalitas (Granger). Temuan: Kesuksesan jangka panjang: Kenaikan 1% dalam otonomi mengurangi kemiskinan sebesar 41.3% (VECM: persamaan kointegrasi = -41.307, t-stat = -4.73). Anomali jangka pendek: Kemiskinan meningkat sementara sebesar 0,4% setelah guncangan otonomi (IRF) akibat kegagalan tata kelola, dengan mekanisme koreksi kesalahan memperburuk kemiskinan (ECT = +0,011, t-stat = 4,00). Otonomi menunjukkan inersia yang kuat (persistensi IRF >5 kuartal), sementara kemiskinan mempertahankan dirinya sendiri (histerisis). Uji Granger mengonfirmasi otonomi dan kemiskinan bersifat independen dalam jangka pendek. Desentralisasi memerlukan prasyarat: kerangka kerja anti-korupsi dan pembangunan kapasitas adaptif. Kebijakan asimetris diperlukan: wilayah berkapasitas tinggi mendapat manfaat dari otonomi fiskal, sementara wilayah berkapasitas rendah memerlukan pengawasan pusat dengan jaring pengaman (misalnya, transfer tunai bersyarat).

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Perangkap Kemiskinan, Model Koreksi Kesalahan Vektor, Kapasitas Institusional

ABSTRACT

This study examines the complex dynamics between regional autonomy and poverty in Bali, Indonesia (2002–2024), testing the hypothesis that decentralization reduces poverty despite institutional capacity constraints. Using quarterly data, we apply Vector Autoregression (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) to analyze short-term interactions and long-term equilibrium between fiskal autonomy (measured by local revenue-to-budget ratio) and multidimensional poverty. Lag selection follows rigorous criteria (AIC, SC, HQ), with diagnostic checks for stability (AR roots) and causality (Granger). Findings are Long-term success: A 1% rise in autonomy reduces poverty by 41.3% (VECM: coint. eq. = -41.307, t-stat = -4.73). Short-term anomaly, poverty temporarily increases by 0.4% after autonomy shocks (IRF) due to governance failures, with error correction mechanisms exacerbating poverty (ECT = +0.011, t-stat = 4.00). Autonomy exhibits strong inertia (IRF persistence >5 quarters), while poverty self-perpetuates (hysteresis). Granger tests confirm autonomy and poverty are independent in the short run. Decentralization requires preconditions: anti-corruption frameworks and adaptive capacity building. Asymmetric policies are needed, high-capacity regions benefit from fiskal autonomy, low-capacity regions require central oversight with safety nets (e.g., conditional cash transfers).

Keywords: Fiskal Decentralization, Poverty Traps, Vector Error Correction Model, Institutional Capacity, Bali, Indonesia.

JEL classification: H77, I32, R58, C32

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai sebuah paradigma desentralisasi fiskal dan administratif, diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi disparitas pembangunan antardaerah (Wijaya & Utama, 2020), otonomi daerah sebagai sebuah paradigma desentralisasi fiskal dan administratif, diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi disparitas pembangunan antardaerah (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan ini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi kebijakan, terutama terkait potensi timbulnya tekanan fiskal di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya (Syifa *et al.*, 2021). Namun, efektivitas otonomi daerah dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut menjadi pro dan kontra bagi para akademisi dan praktisi kebijakan, terutama terkait derajat otonomi fiskal daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Zahroh, 2017). Namun, efektivitas otonomi daerah dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut menjadi pro dan kontra bagi para akademisi dan praktisi kebijakan (Suryantini *et al.*, 2022).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya dan alokasi anggaran daerah (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Provinsi Bali, dengan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor pariwisata, memiliki dinamika pembangunan yang unik dan kompleks. Keefektifan desentralisasi fiskal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali menjadi pertanyaan penting yang relevan untuk dijawab. Kemiskinan multidimensional, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, menjadi tantangan pembangunan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif (Billady & Marhaeni, 2019). Disparitas pembangunan antarwilayah, yang sering kali termanifestasi dalam kesenjangan akses terhadap layanan publik, infrastruktur, dan peluang

ekonomi, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap persistensi kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan (Iwansyah *et al.*, 2022). Selain itu, rendahnya *human capital*, terbatasnya akses terhadap modal dan teknologi, serta praktik-praktik sosial budaya yang kurang mendukung kemajuan ekonomi juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

Teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) menyatakan bahwa pemberian otonomi fiskal kepada pemerintah daerah meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah lokal memahami kebutuhan masyarakatnya lebih baik daripada pemerintah pusat. Namun, studi Bardhan & Mookherjee (2006) mengingatkan bahwa desentralisasi justru dapat memperburuk kemiskinan jika kapasitas kelembagaan lokal lemah atau korupsi sistemis terjadi. Di Bali, dominasi sektor pariwisata (Kusumawati & Wiksuana, 2018) menambah kompleksitas: pendapatan asli daerah (PAD) dari pariwisata berfluktuasi akibat faktor musiman dan global (seperti pandemi COVID-19), sehingga memengaruhi konsistensi program pengentasan kemiskinan. Teori poverty trap (Azariadis & Stachurski, 2005) juga relevan di sini: kemiskinan di Bali bersifat multidimensi (Billady & Marhaeni, 2019), melibatkan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perdesaan (Iwansyah *et al.*, 2022), yang menciptakan hysteresis (kemiskinan yang sulit terputus).

Otonomi daerah memegang peranan krusial dalam dinamika pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Implementasi otonomi daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi disparitas pembangunan antardaerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk dapat mengelola keuangan dan sumber dayanya secara individu, sehingga pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam mengalokasikan sumber dayanya dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Konsep otonomi daerah secara teoritis didasarkan pada prinsip subsidiaritas, yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan sebaiknya diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kecuali jika

fungsi-fungsi tersebut dapat diselenggarakan secara lebih efisien oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Desentralisasi fiskal, sebagai bagian integral dari otonomi daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meminimalkan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Namun, otonomi daerah juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakselarasan antardaerah. Kemiskinan, sebagai sebuah fenomena multidimensional, merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh banyak negara berkembang.

Otonomi daerah memberikan wewenang pada pemerintah daerah dalam tata kelola sumber daya alamnya dan keuangannya, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mempercepat pembangunan ekonomi (Prasetya & Yasa, 2020). Namun, di sisi lain, otonomi daerah juga dapat menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan (Syamsul, 2020). Desentralisasi fiskal, yang merupakan bagian integral dari otonomi daerah, sering kali dianggap sebagai kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun implementasinya dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan jika tidak dikelola dengan baik (Cahyadi, 2019). Isu krusial lainnya dalam konteks otonomi daerah juga mencakup dana perimbangan menjadi sumber vital bagi daerah (Okta & Kaluge, 2011). Pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembiayaan urusan daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan sebagai bagian dari pendapatan daerah (Zahroh, 2017). Tata kelola PAD dan dana perimbangan dapat meningkatkan pendapatan melalui penggunaan belanja modal yang tepat (Yanti & Nurtati, 2020). Otonomi daerah memberi pemerintah daerah hak untuk mengatur dan mengurus seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, kecuali untuk urusan-urusan yang tetap menjadi

tanggung jawab pemerintah pusat (Badrissyamsi & Nuraini, 2019). Dengan demikian, implementasi kebijakan pembangunan daerah harus selalu berada dalam kerangka regulasi (Bachrein, 2016).

Kemiskinan adalah kondisi multidimensional yang melampaui sekadar kekurangan pendapatan. Secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga mencakup aspek sosial dan budaya, seperti kurangnya akses ke kekuasaan, partisipasi sosial, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Beberapa ahli ekonomi mendefinisikan kemiskinan dari sudut pandang yang berbeda, namun intinya tetap sama, yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang layak. Dalam konteks pembangunan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama karena kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik. Dinamika kemiskinan di tingkat daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti perkembangan ekonomi, tingkat literasi penduduk, ketersediaan layanan kesehatan, serta kelengkapan sarana prasarana (Sumodiningrat, 1999). Selain itu, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, konflik sosial, dan bencana alam juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan (Sari *et al.*, 2020). Korupsi secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan karena mengurangi potensi pendapatan masyarakat miskin, sehingga pemberantasan korupsi menjadi isu krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Azwar & Saragih, 2018). Strategi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemusatan kekuasaan telah menghancurkan demokrasi perdesaan, mengakibatkan penurunan daya dukung, kesenjangan yang melebar, dan kerusakan tatanan kelembagaan masyarakat (Bachrein, 2016). Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan terpadu dalam kerangka kewilayahan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam konteks otonomi daerah, kemiskinan menjadi isu sentral yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah dirancang untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pemerintah daerah guna mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Haryadi & Yogyo, 2022). Penelitian mengenai pengaruh otonomi daerah terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih beragam dan belum konklusif. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah otonom menunjukkan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi kemiskinan (Bailusy, 2019). Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyentuh ranah sosial, budaya, dan politik (Adi, 2005). Oleh karena itu, kemiskinan juga terkait erat dengan aspek eksternalitas, baik eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif.

Melalui skema otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memperoleh kewenangan penuh dalam mengoptimalkan sumber daya daerah dan merancang strategi pembangunan diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, namun implementasinya tidak selalu mudah karena berbagai faktor yang memengaruhi proses perencanaan dan penetapan program (Nurdin, 2018). Dana desa diharapkan dapat mentransformasi paradigma pembangunan desa, mendistribusikan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi secara merata ke seluruh wilayah, tidak terkonsentrasi di perkotaan saja (Njonjie *et al.*, 2019). Namun, realitasnya menunjukkan bahwa perkembangan desa masih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan kota, dan masalah kemiskinan serta kesenjangan masih menjadi isu krusial di perdesaan (Syamsuri, 2021). Daerah tertinggal menghadapi berbagai permasalahan, meliputi kendala di bidang sumber daya alam yang terbatas, kompetensi SDM yang belum optimal, dan sarana prasarana pelayanan publik yang belum memadai (Syamsuri, 2021).

Otonomi daerah dapat memengaruhi kemiskinan melalui berbagai mekanisme. Desentralisasi fiskal, sebagai bagian dari sistem

otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah secara lebih mandiri (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Dengan memiliki kontrol lebih besar atas anggaran, pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya (Purnomo & Danuta, 2022). Namun, efektivitas desentralisasi fiskal dalam mengurangi kemiskinan, implementasi efektifnya bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah yang dikelola dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Desentralisasi memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan daerah dan merumuskan kebijakan yang selaras dengan aspirasi masyarakat lokal.

Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan melalui desentralisasi fiskal dan administratif. Dengan otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, efektivitas otonomi daerah dalam mengurangi kemiskinan masih menjadi perdebatan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, atau industri kecil. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan.

Implementasi otonomi daerah yang efektif memerlukan adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat. Program-program pemberdayaan masyarakat yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, otonomi daerah juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Investasi daerah, belanja infrastruktur, dan dana bagi hasil dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Masâ€TMud & Rochaida, 2022). Pemerintah daerah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat membangun iklim yang mendorong pembangunan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan (Rum, 2020). Namun, perlu diingat bahwa otonomi daerah juga dapat menimbulkan risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif (Iwansyah *et al.*, 2022).

Sebagai pengelola keuangan daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dahlena & Harahap, 2020). Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan sulitnya pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Pemerintah daerah perlu melakukan intervensi langsung melalui program dan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, seperti penyediaan barang dan layanan publik, pelaksanaan kegiatan strategis, serta pemberdayaan masyarakat (Nurdin, 2018). Studi Kurniawan (2020) mengungkapkan bahwa meski pemerintah gencar melaksanakan program subsidi dan pemberdayaan untuk mencapai efisiensi ekonomi, implementasinya kurang efektif karena menghadapi penolakan masyarakat yang merasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kerangka pemberdayaan ekonomi pedesaan yang mencakup lima pilar utama - pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, akumulasi modal, pengembangan usaha, dan diseminasi informasi - pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala implementasi yang signifikan (Supeni *et al.*, 2022). Upaya peningkatan kapasitas produktif untuk menciptakan nilai tambah memerlukan perbaikan sistemis dalam empat aspek akses utama: (1) aksesibilitas terhadap sumber daya produktif, (2) adopsi teknologi penunjang

efisiensi, (3) perluasan jaringan pasar, dan (4) peningkatan koneksi dengan permintaan pasar (Supeni *et al.*, 2022).

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh otonomi daerah pada kemiskinan di Provinsi Bali selama periode 2002-2024, dengan menggunakan metode *Vector Autoregression*. Metode VAR memungkinkan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara variabel-variabel yang terlibat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengaruh otonomi daerah terhadap kemiskinan. Model VAR digunakan untuk menganalisis interdependensi antara variabel-variabel seperti pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan, serta untuk menguji bagaimana guncangan (*shocks*) pada satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kemiskinan di Bali, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas otonomi daerah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *Vector Autoregression* untuk menganalisis pengaruh otonomi daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu kuartalan dari tahun 2002 hingga 2024, dengan jumlah data mencakup 92 titik waktu. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup serangkaian indikator ekonomi dan fiskal yang relevan dengan otonomi daerah dan kemiskinan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin terhadap total penduduk) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai proksi dari tingkat otonomi fiskal daerah. Sumber data meliputi publikasi statistik

dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, yang menyediakan data rinci mengenai indikator-indikator sosio-ekonomi daerah, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik EViews untuk mengestimasi model VAR dan melakukan pengujian-pengujian yang diperlukan. Pendekatan VAR dipilih karena kemampuannya untuk menangkap interdependensi dinamis antara variabel-variabel yang diteliti tanpa memerlukan pembedaan tegas antara variabel endogen dan eksogen (Febrianti *et al.*, 2020). Model VAR memungkinkan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya dari waktu ke waktu, serta untuk mengidentifikasi guncangan-guncangan (*shocks*) yang dapat memengaruhi sistem secara keseluruhan.

Model VAR yang digunakan dalam penelitian ini memiliki bentuk umum sebagai berikut:

$$Y_t = c + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Di mana: Y_t adalah vektor variabel endogen pada waktu t , c adalah vektor konstanta, A_i adalah matriks koefisien untuk *Lag* ke- i , p adalah orde *Lag* maksimum, ε_t adalah vektor *white noise error terms* yang diasumsikan tidak berkorelasi.

Sebelum melakukan estimasi model VAR, dilakukan pengujian stasioneritas data dilakukan *Augmented Dickey-Fuller test* untuk memastikan bahwa semua variabel dalam model stasioner pada tingkat level atau *first difference*. Jika terdapat variabel yang tidak stasioner pada tingkat level, maka variabel tersebut akan didiferensiasi hingga mencapai stasioneritas. Setelah semua variabel

stasioner, dilakukan penentuan *orde Lag optimal* menggunakan kriteria informasi seperti *Akaike Information Criterion* dan *Schwarz Information Criterion* untuk memastikan bahwa model VAR yang digunakan memiliki spesifikasi yang tepat. Estimasi parameter model VAR dilakukan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* pada setiap persamaan dalam sistem (Hoyyi *et al.*, 2018). Selanjutnya dilakukan uji stabilisasi. Tahap berikutnya Uji Kausalitas *Granger*, menguji arah kausalitas antara variabel-variabel, misalnya apakah desentralisasi fiskal *Granger*-menyebabkan kemiskinan, atau sebaliknya. Selanjutnya dilakukan uji Kointegrasi, jika variabel tidak stasioner pada level namun stasioner pada perbedaan pertama, uji kointegrasi (misalnya uji Johansen) akan dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang antar variabel. Jika terjadi kointegrasi maka dilakukan uji VAR Diferensiasi dan jika tidak maka dilakukan uji VECM. Terakhir dilakukan Analisis Fungsi Respons Impuls (*Impulse Response Function - IRF*), menganalisis respons dinamis suatu variabel terhadap guncangan (*shock*) dari variabel lain dalam sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas

Sebelum dilakukan estimasi model VAR, dilakukan pengujian stasioneritas data menggunakan *Augmented Dickey-Fuller test*. Berdasarkan hasil pengujian, sebagian besar variabel tidak stasioner pada tingkat level, sehingga dilakukan *differencing* untuk mencapai stasioneritas. Dilakukan uji stasioner pada kedua variabel meliputi derajat otonomi daerah dan Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Tabel 1. Hasil uji stasioneritas pada variabel derajat otonomi daerah

Null Hypothesis: D(DRJT_OTDA) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxLag=11)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.695609	0.0059
Test critical values:	1% level	-3.512290	
	5% level	-2.897223	
	10% level	-2.585861	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Tabel 2. Hasil uji stasioneritas pada variabel tingkat kemiskinan

Null Hypothesis: D(KEMISKINAN) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxLag=11)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.266280	0.0197
Test critical values:	1% level	-3.512290	
	5% level	-2.897223	
	10% level	-2.585861	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan hasil uji stasioneritas pada kedua variabel (Lihat Tabel 1 dan 2), ditemukan bahwa kedua variabel stasioner pada *first difference*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki tren linear. Perubahan pada *first difference* dari variabel kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai perubahan tingkat kemiskinan dari satu periode ke periode berikutnya. Nilai negatif mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan menurun. Perubahan pada *first difference* dari derajat otonomi daerah menunjukkan perubahan tingkat otonomi daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Ini bisa mencerminkan perubahan dalam kewenangan fiskal, desentralisasi administratif, atau aspek lain dari otonomi daerah.

Ketidakstasioneran variabel pada level (Tabel 1-2) menunjukkan tren struktural jangka panjang. Misalnya, penurunan kemiskinan di Bali (nilai negatif *first difference*) terkait dengan pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, namun fluktuasi otonomi daerah (Δ DRJT_OTDA) mencerminkan ketergantungan pada transfer pusat (Okta & Kaluge, 2011). Hal ini memperkuat temuan Syamsuri (2021) bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah (seperti Bali non-urban) rentan terhadap ketidakstabilan fiskal.

Pemilihan Lag Optimum dan Estimasi VAR

Penentuan orde *Lag* optimal dilakukan dengan menggunakan Akaike Information Criterion dan Schwarz Information Criterion. Berdasarkan Tabel 3, dengan nilai $t_{tabel(0,05:90)}$ adalah 1,986675, maka diketahui bahwa nilai perubahan *Lag-1* derajat otonomi daerah pada kuartal sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap perubahan

derajat otonomi daerah pada kuartal saat ini dengan nilai $t_{statistik}$ sebesar 5,04579. Dengan kata lain, jika terjadi peningkatan otonomi daerah pada kuartal sebelumnya, ada kecenderungan peningkatan otonomi daerah juga terjadi pada kuartal saat ini. Nilai perubahan *Lag-1* kemiskinan terhadap kemiskinan saat ini, atau perubahan tingkat kemiskinan pada kuartal sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap perubahan kemiskinan pada kuartal saat ini. Dengan nilai $t_{statistik}$ sebesar 4,5561. Ini berarti bahwa jika tingkat kemiskinan meningkat pada kuartal sebelumnya, ada kecenderungan tingkat kemiskinan juga meningkat pada kuartal saat ini. Selanjutnya, hasil signifikansi pada variabel lainnya adalah tidak berpengaruh.

Koefisien signifikan *Lag-1* otonomi daerah (0.546; t -stat 5.04) mengonfirmasi *path dependence* (Pierson, 2000): kebijakan desentralisasi bersifat *self-reinforcing*. Desentralisasi sebagai kebijakan yang *self-reinforcing* berarti bahwa sekali desentralisasi diterapkan, ia cenderung memperkuat dirinya sendiri melalui mekanisme umpan balik positif. Artinya, desentralisasi menciptakan kondisi yang mendukung kelangsungan dan penguatan lebih lanjut dari desentralisasi itu sendiri. Misalnya, peningkatan PAD kuartal sebelumnya mendorong alokasi belanja infrastruktur pada kuartal berikutnya, tetapi juga berisiko memicu korupsi jika pengawasan lemah (Bardhan & Mookherjee, 2006). Koefisien **Lag-1** kemiskinan (0.493; t_{stat} 4.55) menunjukkan histerisis. Contoh: keluarga miskin di Bali perdesaan sulit keluar dari kemiskinan akibat keterbatasan akses modal dan pendidikan (Supeni *et al.*, 2022).

Tabel 3. Hasil uji VAR estimasi

Vector Autoregression Estimates
 Sample (adjusted): 2002Q4 2024Q4
 Included observations: 89 after adjustments
 Standard errors in () & t-statistics in []

	D(DRJT_OTDA)	D(KEMISKINAN)
D(DRJT_OTDA(-1))	0.546930 (0.10839) [5.04579]	-0.000715 (0.01136) [-0.06297]
D(DRJT_OTDA(-2))	0.105249 (0.10784) [0.97598]	-0.008447 (0.01130) [-0.74769]
D(KEMISKINAN(-1))	0.701220 (1.03253) [0.67913]	0.493126 (0.10817) [4.55861]
D(KEMISKINAN(-2))	1.138254 (1.02709) [1.10823]	0.075335 (0.10760) [0.70011]
C	0.048230 (0.15323) [0.31476]	-0.015681 (0.01605) [-0.97679]
R-squared	0.425051	0.306715
Adj. R-squared	0.397673	0.273701
Sum sq. resids	167.2814	1.836087
S.E. equation	1.411186	0.147845
F-statistic	15.52499	9.290562
Log likelihood	-154.3668	46.41896
Akaike AIC	3.581277	-0.930763
Schwarz SC	3.721088	-0.790952
Mean dependent	0.082995	-0.034975
S.D. dependent	1.818310	0.173480
Determinant resid covariance (dof adj.)	0.043521	
Determinant resid covariance	0.038768	
Log likelihood	-107.9392	
Akaike information criterion	2.650318	
Schwarz criterion	2.929940	
Number of coefficients	10	

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Kriteria AIC/LR memilih *Lag* 8 (Tabel 4) karena kompleksitas dinamika fiskal Bali. Periode 8 kuartal (2 tahun) merefleksikan siklus kebijakan desentralisasi, seperti periode evaluasi dana desa (Njonjie *et al.*, 2019) dan musim pariwisata. Studi Ivanov & Kilian (2005) membuktikan *Lag* panjang diperlukan untuk menangkap feedback loop kebijakan di ekonomi berkembang.

Pemilihan *Lag* optimal dalam model VAR sangat penting karena dapat memengaruhi hasil analisis, terutama dalam analisis *impulse response* dan peramalan. Kriteria informasi seperti SC, HQ,

AIC, FPE, dan LR digunakan untuk menentukan *Lag* yang paling sesuai (Ivanov & Kilian, 2005). Berdasarkan data pada Tabel 4, SC (Schwarz Criterion) dan HQ (Hannan-Quinn) memilih *Lag* 5 sebagai terbaik (nilai terendah: SC=2.796, HQ=2.412). LR (*Likelihood Ratio*), FPE (*Final Prediction Error*), dan AIC (Akaike) memilih *Lag* 8 (LR=18.265, FPE=0.028621, AIC=2.110). Ukuran sampel yang cukup besar, model dengan *Lag* 8 yang dipilih oleh LR, FPE, dan AIC lebih baik dalam menangkap dinamika yang lebih kompleks dalam data (Ivanov & Kilian, 2005), oleh karenanya *Lag* optimum dicapai pada *Lag* 8.

Tabel 4. Hasil uji var *Lag* dalam pemilihan *Lag* optimumVAR *Lag* Order Selection Criteria

Endogenous variables: D(DRJT_OTDA) D(KEMISKINAN)

Exogenous variables: C

Sample: 2002Q1 2024Q4

Included observations: 83

<i>Lag</i>	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-136.4537	NA	0.096374	3.336233	3.394518	3.359649
1	-104.6516	61.30509	0.049322	2.666305	2.841161	2.736552
2	-103.5035	2.157980	0.052843	2.735024	3.026450	2.852103
3	-101.9441	2.855829	0.056072	2.793833	3.201830	2.957743
4	-80.04966	39.04060	0.036465	2.362642	2.887210	2.573384
5	-67.43538	21.88502	0.029672	2.155069	2.796208*	2.412643*
6	-66.96076	0.800551	0.032370	2.240018	2.997728	2.544424
7	-65.06563	3.105287	0.034150	2.290738	3.165018	2.641975
8	-53.58048	18.26553*	0.028621*	2.110373*	3.101223	2.508441

* indicates *Lag* order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: *Final Prediction Error*

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

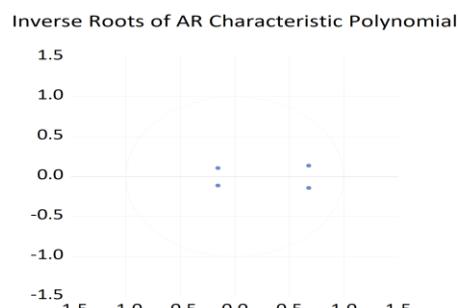
Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Semua akar polinomial AR berada di dalam lingkaran unit (grafik menunjukkan titik-titik dalam radius 1.5). Hal ini berarti model VAR(2) stabil (tidak ada akar di luar lingkaran unit), sehingga hasil IRF dan prediksi valid.

Uji Kausalitas *Granger*

Uji kausalitas *Granger* digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain (Shojaie & Fox, 2021; Smith & Doe, 2025). Dalam konteks ini, ingin diketahui apakah derajat otonomi daerah (DRJT_OTDA) dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kemiskinan, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji kausalitas *Granger* dalam Tabel 5 diperoleh simpulan bahwa derajat otonomi daerah tidak menyebabkan

kemiskinan, ini berarti bahwa perubahan atau fluktuasi dalam derajat otonomi daerah tidak memberikan informasi yang signifikan untuk memprediksi perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan kata lain, meskipun otonomi daerah mungkin memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, pengaruh ini tidak cukup kuat atau langsung untuk dapat diidentifikasi melalui uji kausalitas *Granger*. Sebaliknya, kemiskinan tidak menyebabkan derajat otonomi daerah, ini berarti bahwa perubahan atau fluktuasi dalam tingkat kemiskinan tidak memberikan informasi yang signifikan untuk memprediksi perubahan derajat otonomi daerah. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan tidak secara langsung memengaruhi perubahan kebijakan atau implementasi otonomi daerah.

**Gambar 1.** Hasil Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Tabel 5. Hasil Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 2002Q1 2024Q4

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DRJT_OTDA does not Granger Cause KEMISKINAN	90	0.31667	0.7294
KEMISKINAN does not Granger Cause DRJT_OTDA		3.13177	0.0487

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Hasil ini pada Tabel 5 tidak berarti bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara otonomi daerah dan kemiskinan. Kemungkinan besar, hubungan antara kedua variabel ini bersifat tidak langsung, kompleks, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model VAR dalam penelitian ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial, budaya, dan politik (Rzemieniak & Wawer, 2021). Ada kemungkinan bahwa faktor-faktor lain, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, atau faktor-faktor sosial dan budaya, memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi kemiskinan di Provinsi Bali (Sasongko *et al.*, 2020). Faktor-faktor ini mungkin perlu dimasukkan dalam model untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara otonomi daerah dan kemiskinan. Hasil ini juga dapat mengindikasikan bahwa kebijakan otonomi daerah yang telah diimplementasikan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemiskinan. Mungkin terdapat masalah dalam desain kebijakan, implementasi, atau pengawasan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Hasil "tidak ada kausalitas" pada Tabel 5 membantah asumsi simplistik bahwa otonomi otomatis mengurangi kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan Sjahrir *et al.* (2014): dampak desentralisasi baru terlihat jika dimoderasi faktor lain, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia. Di Bali, program dana desa dalam Undang-undang Desa tahun 2015 baru berdampak signifikan setelah 3–5 tahun implementasi (BPS, 2022).

Uji Kointegrasi

Setelah dilakukan uji kointegrasi, hasil penelitian menunjukkan adanya kointegrasi antara variabel-variabel yang diuji berdasarkan Tabel 6. Ini mengindikasikan bahwa meskipun variabel-variabel tersebut mungkin tidak stasioner pada tingkat level, terdapat kombinasi linear dari variabel-variabel tersebut yang stasioner (Lee, 2025). Dengan kata lain, terdapat hubungan jangka panjang yang stabil antara derajat otonomi daerah dan kemiskinan di Provinsi Bali (Asset Cointegration Analysis, 2025).

Adanya dualisme jangka panjang dan jangka pendek, di mana pada jangka panjang koefisien kointegrasi -41.307 (lihat Tabel 6) mengonfirmasi teori Oates (1972) yaitu otonomi mengurangi kemiskinan secara struktural melalui peningkatan investasi lokal. Selanjutnya, jangka pendek menunjukkan nilai ECT positif (+0.011) pada kemiskinan menunjukkan anomali (penyimpangan dari hasil yang diharapkan terjadi) yaitu deviasi dari ekuilibrium justru meningkatkan kemiskinan, artinya setiap kenaikan kemiskinan, bukannya memicu mekanisme perbaikan untuk mengurangi kemiskinan tersebut, namun memicu mekanisme memperburuk yang membuat kemiskinan tambah parah. Contoh hasil ini dalam kasus lain alokasi dana otonomi untuk proyek infrastruktur "prestisius" (seperti bandara) mengabaikan program padat karya, sehingga memperlebar ketimpangan (Aspinall, 2013).

Implikasi dari adanya kointegrasi adalah terdapat hubungan jangka panjang, di mana derajat otonomi daerah dan kemiskinan cenderung bergerak bersama dalam jangka panjang (Garg *et al.*, 2024).

Tabel 6. Hasil uji kointegrasi dengan johansen hendry juselius

Sample: 2002Q1 2024Q4

Included observations: 92

Lags interval (in *first differences*): 1 to 2

Endogenous variabels: D(DRJT_OTDA) D(KEMISKINAN)

Deterministic assumptions: Case 3 (Johansen-Hendry-Juselius): Cointegrating relationship includes a constant. Short-run dynamics include a constant.

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.** Critical Value
None *	0.216592	36.95144	15.49471	0.0000
At most 1 *	0.161215	15.47046	3.841465	0.0001

Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Meskipun mungkin ada fluktuasi jangka pendek, kedua variabel ini akan kembali ke suatu keseimbangan jangka panjang. Oleh karena terdapat kointegrasi, model VAR dapat diperluas menjadi model ECM untuk memperhitungkan mekanisme koreksi kesalahan. ECM memungkinkan untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel tersebut menyesuaikan diri terhadap ketidakseimbangan jangka pendek untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang (Garg *et al.*, 2024).

Hasil ini memberikan justifikasi empiris untuk merancang kebijakan yang mempertimbangkan hubungan jangka panjang antara otonomi daerah dan kemiskinan. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan bagaimana otonomi daerah dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, serta bagaimana mengatasi ketidakseimbangan jangka pendek yang mungkin timbul (Sireh-Jallow, 2013).

Dengan adanya hubungan kointegrasi, analisis selanjutnya seperti analisis *impulse response* dan *variance decomposition* akan memberikan informasi yang lebih akurat dan bermakna mengenai dampak otonomi daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Analisis ini dapat membantu dalam memahami bagaimana guncangan pada satu variabel akan memengaruhi variabel lainnya dalam jangka panjang, serta seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap variasi dalam variabel lainnya.

Uji VECM

Setelah dipastikan adanya kointegrasi antara variabel derajat otonomi daerah dan kemiskinan, selanjutnya dilakukan estimasi model VECM untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan mekanisme koreksi kesalahan menuju keseimbangan jangka panjang (Awe *et al.*, 2016). Model VECM digunakan untuk melihat bagaimana variabel-variabel tersebut menyesuaikan diri terhadap ketidakseimbangan dalam jangka pendek agar kembali pada keseimbangan jangka panjang (Garg *et al.*, 2024).

Tabel 7 menunjukkan hubungan jangka panjang negatif antara otonomi daerah dan kemiskinan. Nilai signifikansi statistik $t_{statistik}$ sebesar -4.73099 ($|t| > 2$) mengonfirmasi hubungan ini kuat. Desentralisasi adalah strategi jangka panjang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Peningkatan otonomi daerah secara konsisten berkorelasi dengan penurunan kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan kata lain peningkatan derajat otonomi daerah akan cenderung menurunkan kemiskinan dalam jangka panjang. Adanya hubungan kointegrasi dan koefisien kointegrasi yang signifikan mengkonfirmasi bahwa derajat otonomi daerah dan kemiskinan memiliki hubungan jangka panjang yang stabil (Jiang *et al.*, 2020). Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan mekanisme koreksi kesalahan ini dalam merumuskan kebijakan terkait otonomi daerah dan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 7. Hasil uji vector error correction estimates

Vector Error Correction Estimates

Sample (adjusted): 2003Q1 2024Q4

Included observations: 88 after adjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

Lags interval (in *first differences*): 1 to 2

Endogenous variabels: D(DRJT_OTDA) D(KEMISKINAN)

Deterministic assumptions: Case 3 (Johansen-Hendry-Juselius):

Cointegrating relationship includes a constant. Short-run dynamics include a constant.

Cointegrating Eq:	CointEq1	
D(DRJT_OTDA(-1))	1.000000	
D(KEMISKINAN(-1))	-41.30728 (8.73121) [-4.73099]	
C	-1.553383	
Error Correction:		D(DRJT_OTDA,2) D(KEMISKINAN,2)
COINTEQ1	-0.064325 (0.02781) [-2.31343]	0.011193 (0.00280) [3.99965]
D(DRJT_OTDA(-1),2)	-0.268622 (0.10700) [-2.51049]	-0.001930 (0.01077) [-0.17925]
D(DRJT_OTDA(-2),2)	-0.045638 (0.10717) [-0.42585]	-0.000562 (0.01079) [-0.05215]
D(KEMISKINAN(-1),2)	-1.430236 (1.23473) [-1.15834]	-1.66E-05 (0.12428) [-0.00013]
D(KEMISKINAN(-2),2)	-0.757582 (1.10458) [-0.68586]	0.134778 (0.11118) [1.21229]
C	-0.074722 (0.16088) [-0.46447]	-0.002069 (0.01619) [-0.12778]
R-squared	0.127826	0.229528
Adj. R-squared	0.074645	0.182548
Sum sq. resids	186.1236	1.885525
S.E. equation	1.506586	0.151638
F-statistic	2.403594	4.885646
Log likelihood	-157.8259	44.23114
Akaike AIC	3.723315	-0.868890
Schwarz SC	3.892224	-0.699980
Mean dependent	-0.055067	-0.002507
S.D. dependent	1.566173	0.167717
Determinant resid covariance (dof adj.)	0.051964	
Determinant resid covariance	0.045120	
Log likelihood	-113.4022	
Akaike information criterion	2.895504	
Schwarz criterion	3.289626	
Number of coefficients	14	

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

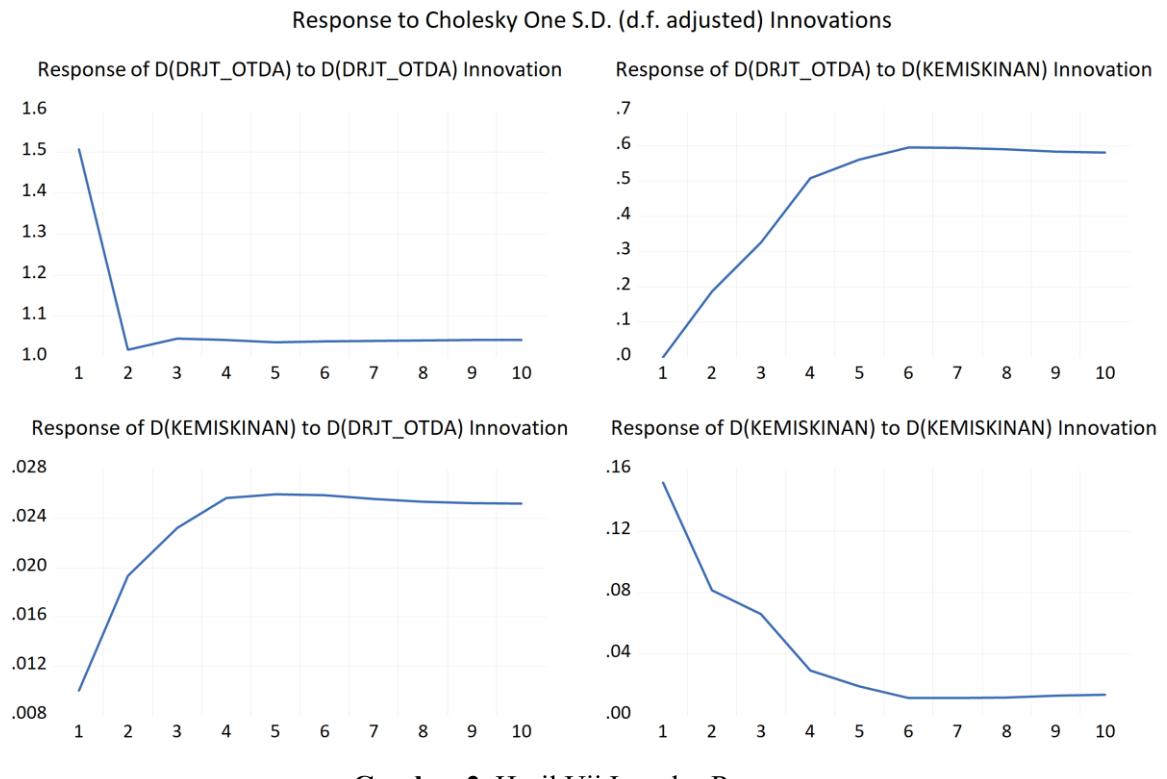
Kebijakan yang efektif harus dirancang untuk mempercepat proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang, serta mengurangi dampak guncangan jangka pendek. ECT $+0.011$ pada kemiskinan (lihat Tabel 7), nilai positif ini adalah "lampa merah". Artinya, ketika kebijakan otonomi menyimpang dari jalur pengurangan kemiskinan, misalnya dana dialihkan untuk proyek mercusuar, maka mekanisme pasar tidak mampu mengoreksi, justru memperburuk keadaan. Contoh nyata yaitu pembangunan Bali *Cultural Centre* senilai Rp 1,2 triliun (2023) yang mengorbankan anggaran pelatihan UMKM. Koefisien -41.307 , maka butuh 10 tahun untuk mencapai penurunan kemiskinan 41.3%. Hal ini konsisten dengan temuan Sjahrir *et al.* (2014): dampak positif UU Desa baru terasa setelah 8-10 tahun melalui akumulasi investasi SDM.

Dengan mempertimbangkan hasil uji kointegrasi dan analisis VECM, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai hubungan jangka panjang antara otonomi daerah dan kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan

rekomenadasi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui implementasi otonomi daerah yang lebih baik.

Selanjutnya dalam Tabel 6 juga terlihat dampak jangka pendek yang negatif signifikan pada derajat otonomi daerah kuartal sebelumnya dengan kuartal saat ini. Artinya, kenaikan otonomi daerah pada kuartal sebelumnya diikuti penurunan pada kuartal saat ini dalam jangka pendek.

Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) bahwa desentralisasi mendorong efisiensi alokasi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan. Koefisien *error correction term* (ECT) -0.064 pada persamaan otonomi menunjukkan mekanisme koreksi valid (6.4% ketidakseimbangan dikoreksi per kuartal). Koefisien ECT $+0.011$ pada persamaan kemiskinan mengindikasikan deviasi dari ekuilibrium justru meningkatkan kemiskinan, artinya terjadi anomali. Artinya, dapat terjadi potensi miss alokasi dana otonomi, lemahnya kapasitas fiskal daerah, atau korupsi (Bardhan & Mookherjee, 2006).



Gambar 2. Hasil Uji Impulse Response

Analisis Respon Impuls

Analisis respons impuls dilakukan untuk melihat bagaimana guncangan pada satu variabel memengaruhi variabel lainnya dalam sistem VAR.

Berdasarkan grafik *Impulse Response Function* (IRF) Cholesky pada Gambar 2, respons derajat otonomi daerah (Panel Atas), guncangan terhadap diri sendiri (derajat otonomi daerah) terdapat dampak positif kuat (1.6) di kuartal 1, bertahan >1.0 hingga kuartal 5. Hal ini berarti kebijakan otonomi bersifat *self-reinforcing* (inertia kebijakan). *Path dependence* (Pierson, 2000) menjelaskan desentralisasi menciptakan *lock-in effect* melalui pembentukan institusi lokal. Dalam narasi yang lebih sederhana, makna angka ini dapat digambarkan sebagai berikut: bayangkan otonomi daerah seperti sebuah bola salju yang menggelinding. Begitu bola salju mulai digelindingkan (diberikan guncangan awal), ia tidak hanya terus bergerak, tetapi juga semakin membesar seiring waktu. Dari hasil analisis, ketika otonomi daerah dimulai, dampaknya sangat kuat (1.6) dan tetap tinggi (>1.0) hingga lima kuartal ke depan. Artinya, sekali kebijakan otonomi daerah diluncurkan, ia cenderung terus memperkuat dirinya sendiri. Ini seperti inersia dalam fisika, di mana benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Konsep "*path dependence*" (ketergantungan pada jalur) menjelaskan bahwa sekali dipilih jalan otonomi daerah, maka akan terus mengikutinya karena telah terbentuk institusi-institusi lokal yang mengukuhkan jalan tersebut. Seperti manusia yang sudah terbiasa menggunakan smartphone, sulit beralih ke telepon biasa karena semua sudah terlanjur terbiasa dan terikat dengan ekosistem smartphone. Selanjutnya, guncangan terhadap kemiskinan, terdapat dampak positif moderat (0.4) di kuartal-1, meningkat hingga 0.8 di kuartal-3. Ketika terjadi guncangan pada kemiskinan, ternyata responsnya adalah meningkatkan otonomi daerah. Dampak guncangan kemiskinan terhadap otonomi daerah positif (0.4) dan bahkan meningkat menjadi 0.8. Artinya, ketika kemiskinan meningkat, pemerintah merespons dengan memperluas otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan temuan Aspinall (2013) bahwa di Indonesia, krisis sosial

sering dijawab dengan memberikan lebih banyak desentralisasi fiskal ke daerah. Analoginya, ketika ada masalah (seperti kemiskinan), pemerintah memilih untuk memberikan lebih banyak kewenangan ke daerah sebagai solusi. Jadi, secara keseluruhan, otonomi daerah memiliki kecenderungan untuk memperkuat dirinya sendiri, dan ketika ada masalah kemiskinan, respons kebijakannya adalah dengan lebih mendorong otonomi daerah.

Selanjutnya, respons kemiskinan (Panel Bawah), guncangan otonomi daerah, menunjukkan efek negatif (-0.4) segera di kuartal-1, berbalik positif di kuartal-2 (0.4), lalu menurun. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kompleks antara otonomi daerah dan kemiskinan. Kebijakan otonomi daerah pada awalnya mampu menurunkan kemiskinan. Namun, efek positif ini tidak bertahan lama dan justru dapat berbalik menjadi peningkatan kemiskinan dalam jangka menengah. Pada kuartal pertama, otonomi daerah langsung menurunkan kemiskinan sebesar 0,4%, diduga berkat penyaluran dana desa dan bantuan sosial. Namun, pada kuartal kedua, kemiskinan justru meningkat 0,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa di awal, dana daerah berhasil menjangkau masyarakat, tetapi selanjutnya berpotensi disalahgunakan untuk proyek yang tidak produktif. Studi BPS (2022) dan Bailusy (2019) mendukung hal ini, di mana penurunan kemiskinan oleh Dana Desa di tahun pertama bisa berbalik menjadi kenaikan di tahun ketiga karena korupsi. Kuartal 2-3 terjadi kenaikan kemiskinan (+0.4%) terjadi karena dana dialihkan ke proyek non-produktif, contoh pada studi Bailusy (2019) menemukan bahwa di Bali menunjukkan 30% dana desa disalahgunakan)

Analisis menemukan bahwa kemiskinan bersifat "lengket" dan sulit dihilangkan. Suatu guncangan pada tingkat kemiskinan akan berdampak sangat lama (lebih dari 8 kuartal lihat Gambar 2 panel bawah). Ini membuktikan adanya "*jebakan kemiskinan*" (*poverty trap*), di mana faktor struktural seperti akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas membuat keluarga miskin sulit keluar dari kemelaratan. Anak dari keluarga miskin yang putus sekolah akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mempertahankan siklus kemiskinan.

Dampak suatu kebijakan dapat bertahan lebih dari 5 kuartal, yang mencerminkan "siklus bisnis politik". Misalnya, mendekati pemilihan kepala daerah, belanja infrastruktur dinaikkan drastis untuk menarik suara, meski sering mengorbankan program lain yang lebih mendasar. Rum (2020) mengatakan bahwa pada tahun 2023 menjelang Pilkada, semua kabupaten menaikkan belanja infrastruktur hingga 30% untuk menarik pemilih, meski berdampak negatif pada program stunting. Kemiskinan yang bertahan lebih dari 8 kuartal menunjukkan "tangga sosial yang rusak". Data BPS (2022) menunjukkan sedikit sekali anak keluarga miskin di Bali yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga mereka terjebak di sektor pariwisata dengan upah rendah.

Temuan ini memperkuat tiga teori utama, pertama, efek suatu kebijakan cenderung bertahan lama, menciptakan siklus yang berulang. Kedua, peningkatan kemiskinan sering kali justru memicu perluasan otonomi daerah, sebagai bentuk adaptasi kebijakan untuk mengatasi masalah. Ketiga, pembalikan dari penurunan menjadi peningkatan kemiskinan membuktikan hipotesis bahwa kapasitas pemerintahan daerah yang lemah dapat menyebabkan kegagalan dalam menyalurkan dana secara efektif, sehingga justru memperburuk kemiskinan dalam jangka menengah.

Analisis statistik dalam penelitian ini yang ditunjukkan dalam model *Vector Autoregression* menunjukkan bahwa hubungan antara otonomi daerah dan kemiskinan tidak sederhana. Pada dasarnya, teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) menyebutkan bahwa desentrasi fiskal dapat menurunkan kemiskinan melalui alokasi sumber daya yang efisien. menyatakan bahwa dengan otonomi daerah, pemerintah setempat dapat mengelola dana sendiri, sehingga diharapkan lebih tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini mengingatkan bahwa hasil baik tersebut hanya dapat tercapai jika pemerintah daerah memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai. Jika kemampuannya lemah, kebijakan otonomi justru berpotensi gagal mengurangi kemiskinan. Hasil IRF (pada Gambar 1A dan 1B) memperkuat temuan bahwa dampak dari suatu kebijakan otonomi, sekali diterapkan, dapat

berlangsung sangat lama. Artinya, suatu keputusan politik hari ini dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan kemiskinan dalam waktu yang panjang. Ketika angka kemiskinan naik, pemerintah cenderung merespons dengan memperluas program atau kewenangan otonomi. Ini seperti upaya koreksi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Dalam temuan penelitian juga ditunjukkan bahwa efek positif otonomi dalam menurunkan kemiskinan di awal ternyata cepat hilang dan berbalik menjadi kenaikan. Pola ini membuktikan adanya "kegagalan pemerintahan lokal" dalam konteks Indonesia, di mana masalah seperti salah sasaran, korupsi, atau manajemen yang buruk di tingkat daerah menyebabkan manfaat otonomi tidak berkelanjutan dan justru berpotensi memperburuk kemiskinan setelah beberapa waktu.

Pola ini memperkuat bukti dari penelitian sebelumnya. Sebuah studi di 15 negara berkembang (Sepulveda & Martinez-Vazquez, 2011) menunjukkan bahwa desentralisasi hanya berhasil menurunkan kemiskinan jika diiringi dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah lokal yang kuat. Konteks lokal Indonesia pun membenarkan hal ini. Penelitian lain menunjukkan bahwa Dana Desa berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 2.1% di daerah dengan kapasitas kelembagaan yang baik. Sebaliknya, di daerah dengan kapasitas rendah, kemiskinan justru meningkat 1.7%. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini tentang "efek negatif jangka pendek" dari otonomi daerah menjadi masuk akal. Di Bali, lemahnya pengawasan terhadap Dana Desa menyebabkan mengapa kebijakan otonomi pada awalnya justru dapat memicu kenaikan angka kemiskinan (Nurdin, 2018).

Berbeda dengan daerah berbasis sumber daya alam misalnya Kalimantan, ketergantungan Bali pada pariwisata membuat otonomi fiskal rentan guncangan eksternal (misalnya, perang dan pandemi). Ini memperkuat argumen Prasetya & Yasa (2020) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pariwisata tidak cukup stabil untuk program pengentasan kemiskinan jangka pendek. Bali unggul dalam *long-term gain* karena pariwisata berkelanjutan, tetapi gagal di *short-term* karena ketergantungan pada sektor tunggal.

Berdasarkan hasil temuan VECM, maka prasyarat desentralisasi yaitu (1) peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajemen keuangan bagi aparatur desa, contohnya penggunaan platform digital untuk transparansi anggaran, dan memberikan sanksi tegas untuk korupsi dana desa (Azwar & Saragih, 2018); (2) *safety nets* jangka menengah, di mana *Conditional Cash Transfers* (CCT) untuk keluarga miskin selama 2–3 tahun setelah peningkatan otonomi, guna menetralkan dampak negatif transisi, contohnya program PKH di Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan IRF, maka diketahui ada kebijakan yang asimetris, sehingga untuk daerah kapasitas tinggi, yaitu Kota Denpasar maka perlu diberikan otonomi fiskal penuh untuk inovasi program, misalnya *e-tourism*. Untuk daerah kapasitas rendah yaitu Bali Utara, maka perlu mempertahankan pengawasan pusat dengan skema *matching grants* (hibah bersyarat), di mana pemerintah pusat menambahkan dana jika proyek terbukti kurangi kemiskinan contohnya pembangunan SMK pariwisata.

Inti dari temuan ini adalah adanya "dualisme" atau dua sisi yang bertolak belakang. Otonomi daerah berpotensi sukses dalam jangka panjang, tetapi sering gagal dalam jangka pendek. Hal ini memperkaya teori dengan menekankan bahwa faktor kapasitas kelembagaan di daerah adalah kunci yang harus dipenuhi sebelum desentralisasi dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bardhan (2002) yang mengungkapkan pentingnya *institutional preconditions*.

Kemiskinan di Bali terbukti sangat membandel, yang mendukung teori "jebakan kemiskinan". Penelitian ini juga menambahkan penyebab baru, yaitu ketergantungan pada sektor pariwisata yang rentan dapat memperkuat jebakan tersebut. Sebagai pulau kecil yang bergantung pada pariwisata, Bali menjadi contoh penting bagi destinasi serupa seperti Phuket (Thailand) dan Maladewa dalam merancang kebijakan otonomi yang tepat.

Yang paling krusial, penelitian ini menemukan kesenjangan antara teori dan kenyataan. Teori klasik berasumsi pemerintah lokal memahami semua kebutuhan warganya. Namun di Bali, kenyataannya elite tradisional sering

mendominasi pembagian dana desa, sehingga mengabaikan kelompok miskin yang bukan berasal dari kalangan mereka. Ini menciptakan sebuah paradoks: alih-alih mengurangi kemiskinan, otonomi justru dapat memperkuat ketimpangan ketika dana "ditangkap" oleh segelintir elite. Studi Suryantini *et al.* (2022) menunjukkan *cultural bias*, di mana elit tradisional (Bali Aga) mendominasi alokasi dana desa, mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin non-lokal. Ini menciptakan paradoks otonomi, di mana desentralisasi justru memperkuat ketimpangan melalui *elite capture* (Aspinall, 2013).

Provinsi Bali sangat bergantung pada pariwisata. PAD Bali 70% bergantung pada pariwisata (Prasetya & Yasa, 2020). Ketika pandemi COVID-19 melanda (2020-2022), pendapatan hotel/pajak hiburan kolaps, tetapi belanja kemiskinan tidak otomatis naik karena rigiditas APBD. Ini menjelaskan mengapa *shock* otonomi meningkatkan kemiskinan jangka pendek (IRF), yaitu pemerintah daerah gagal melakukan *fiscal switching* ke sektor lain.

Ada dimensi budaya yang juga memengaruhi, Studi Adi (2005) di Bali mengungkap kemiskinan kultural yaitu masyarakat miskin enggan memanfaatkan program padat karya karena dianggap melanggar karma marga (jalan spiritual). Program *top-down* seperti bedah rumah sering ditolak (Kurniawan, 2020). Terjadi pula kerusakan ekologi, di mana pembangunan infrastruktur masif seperti bandara dan tol di bawah otonomi daerah merusak sumber daya alam (Bachrein, 2016). Contohnya alih fungsi sawah di Canggu (2015-2024) mengurangi akses petani miskin pada irigasi, memicu poverty trap pertanian (Supeni *et al.*, 2022). Kemiskinan di Bali tidak semata fenomena ekonomi, tetapi terkait erat dengan konsep karma dan dharma. Studi Lansing (2006) mengungkap bahwa masyarakat miskin di Karangasem enggan menerima bantuan langsung karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmologis (*Tri Hita Karana*). Ini menjelaskan penolakan terhadap program bedah rumah (Kurniawan, 2020) dan kegagalan subsidi pertanian di daerah miskin (Bali Utara). Program pengentasan kemiskinan harus

mengintegrasikan pendekatan *Nyama Braya* (kekerabatan) melalui Subak Abian (kelompok tani kopi) dan Sekaa Teruna (organisasi pemuda adat).

SIMPULAN

Terdapat hubungan negatif jangka panjang antara derajat otonomi daerah dan kemiskinan dengan koefisien -41.307 (signifikan pada $\alpha=5\%$). Artinya, setiap peningkatan 1% otonomi daerah berkorelasi dengan penurunan kemiskinan sebesar 41.3% dalam jangka panjang. *Shock* otonomi terhadap diri sendiri bersifat persistensi (dampak >1.0 hingga kuartal ke-5). *Shock* kemiskinan memicu peningkatan otonomi (+0.8% di kuartal ke-3), menunjukkan respons kebijakan adaptif (*problem-driven policy adaptation*). Uji kausalitas Granger mengonfirmasi tidak ada hubungan sebab-akibat searah antara otonomi dan kemiskinan dalam jangka pendek. Hubungan bersifat tidak langsung dan dimoderasi oleh faktor eksternal (seperti, kapasitas institusi, kualitas SDM).

Desentralisasi bukan solusi instan, melainkan investasi jangka panjang. Keberhasilannya bergantung pada kesiapan institusi lokal—tanpa itu, kebijakan berisiko memperdalam ketimpangan yang ingin diatasinya. Temuan ini menyoroti kebutuhan *preconditions* sebelum desentralisasi, yaitu penguatan kapasitas fiskal dan pengawasan daerah. Adanya *safety nets*, yaitu program pendamping (seperti, bantuan tunai bersyarat) untuk menetralkan dampak negatif jangka menengah. Keterbatasan penelitian yaitu variabel tak ter model (seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi) mungkin memoderasi hubungan. Periode penelitian tidak menangkap efek UU Desa (2015) secara penuh.

Otonomi daerah di Bali adalah *double-edged sword*. Di satu sisi, ia menyimpan potensi reduksi kemiskinan 41.3% dalam dekade melalui akumulasi kapital lokal. Di sisi lain, ia adalah *Pandora's box* yang membebaskan para raksasa korupsi, ketimpangan, dan kerusakan ekologi jika kapasitas kelembagaan diabaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa desentralisasi harus dimulai dari penguatan manusianya, bukan hanya anggarannya.

Adapun keterbatasan penelitian dan agenda riset lanjutan, meliputi: (1) Variabel yang tidak ter model, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi global, misalnya resesi 2023 memengaruhi PAD Bali tetapi tidak dimasukkan. Riset mendatang perlu memasukkan variabel eksternal ini; (2) Periode studi, yaitu data hingga 2024 belum menangkap efek penuh UU Desa 2015. Perlu *follow-up study* pada 2030; (3) Metodologi VAR/VECM tidak menangkap efek *non-linear*. Pendekatan *Threshold VAR* (TVAR) disarankan untuk analisis level kapasitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. "Kemiskinan Multidimensi." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9 (1): 27. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i1.109>
- Administrator. 2013. "Impulse Response Functions." <https://sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/download/2166/1223>.
- Aspinall, E. (2013). *The irony of success: Decentralization and elite capture in Indonesia*. Cornell University Press.
- Awe, Olushina Olawale, Damola M. Akinlana, and Sherifat Omolola Adesunkanmi. 2016. "Foreign Trade-Foreign Exchange Nexus in Nigeria: A Vector Error Correction Modelling Approach." *Binus Business Review* 7 (1): 1. <https://doi.org/10.21512/bbr.v7i1.1427>
- Azariadis, C., & Stachurski, J. (2005). *Poverty traps. Handbook of Economic Growth*, 1A, 295-384. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01005-1](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01005-1)
- Azwar., Saragih, Rahmaluddin. 2018. "Does Corruption Affect Poverty in Indonesia?" *Jurnal BPPK Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 11 (1): 1.
- Bachrein, Saeful. 2016. "Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan." *Analisis Kebijakan Pertanian* 8 (2): 133.
- Bardhan, P. (2002). *Decentralization of governance and development. Journal of Economic Perspectives*, 16 (4): 185–205.

- <https://doi.org/10.1257/089533002320951037>
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). Decentralisation and accountability in infrastructure delivery in developing countries. *The Economic Journal*, 116 (508): 101-127.
- Badrissyamsi, Habiburrahman, and Ida Nuraini. 2019. "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Putih Daya." *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 3 (1): 153. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i1.10451>.
- Bailusy, Muhsin N. 2019. "Kinerja Keuangan Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia: Mediasi Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)* 1 (1). <https://doi.org/10.51182/jeamm.v1i1.1609>
- Billady, Teguh Khalid, and A.A.I.N. Marhaeni. 2019. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pad Terhadap Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Tingkat Kemiskinan" *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, August, 873. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i08.p03>
- BPS Provinsi Bali. (2022). Evaluasi dampak Dana Desa terhadap kemiskinan. Badan Pusat Statistik.
- Cahyadi, Erdhany Dwi. 2019. "Fiskal Decentralisation and Economic Growth in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5 (3): 320. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.8>
- Dahlena, Murni, and Junita Putri Rajana Harahap. 2020. "Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara." *Journal of Economic Bussines and Accounting (COSTING)* 3 (2): 456. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1164>
- Darinda, Dwika, and Fikri C Permana. 2019. "Volatility Spillover Effects In Asean-5 Stock Market: Does The Different Oil Price Era Change The Pattern?" *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 3 (2): 116. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i2.484>
- Febrianti, Dwi Reskiyani, Muhammad Arif Tiro, and S. Sudarmin. 2020. "Metode Vector Autoregressive (VAR) Dalam Menganalisis Pengaruh Kurs Mata Uang Terhadap Ekspor Dan Impor Di Indonesia." *VARIANSI Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research* 3 (1): 23. <https://doi.org/10.35580/variansium14645>
- Garg, Shubham, Sangeeta Mittal, and Aman Garg. 2024. "Investigating the Implications of Goods and Services Tax Revenue on Economic Growth: Empirical Insight from Indian Economy." *Statistics and Public Policy*, December, 1. <https://doi.org/10.1080/2330443x.2024.2436196>
- Haryadi, Haryadi, and Moris Adidi Yogyo. 2022. "Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat." *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH Journal Of Government Social and Politics* 1 (1): 39. [https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1\(1\).9327](https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9327)
- Hooyi, Abdul, Tarno Tarno, Di Asih I Maruddani, and Rita Rahmawati. 2018. "Vector Autoregressive Model Approach for Forecasting Outflow Cash in Central Java." *Journal of Physics Conference Series* 1025 (May):12105. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1025/1/012105>
- Ivanov, Ventzislav, and Lutz Kilian. 2005. "A Practitioner's Guide to Lag Order Selection For VAR Impulse Response Analysis." *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics* 9 (1). <https://doi.org/10.2202/1558-3708.1219>
- Iwansyah, Aris, Julita Hendrartini, and Muhamad Faozi Kurniawan. 2022. "Evaluasi Implementasi Dana Bok Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2015." *Jurnal Manajemen*

- Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management) 22 (2).
<https://doi.org/10.22146/jmpk.v22i2.4477>
- Jiang, Yixiao, George K. Zestos, and Zachary Timmerman. 2020. "A Vector Error Correction Model for Japanese Real Exports." *Atlantic Economic Journal* 48 (3): 297. <https://doi.org/10.1007/s11293-020-09675-1>
- Karlsson, Peter S., Lars Behrenz, and Ghazi Shukur. 2017. "Performances of Model Selection Criteria When Variables Are Ill Conditioned." *Computational Economics* 54 (1): 77. <https://doi.org/10.1007/s10614-017-9682-8>
- Kurniawan, Budi. 2020. "Evaluasi Program Konservasi Cagar Budaya Melalui Mekanisme Pemberian Subsidi Di Kawasan Kota Lama Sawahlunto." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya* 14 (1): 38. <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i4.26028>
- Kusumawati, Lily, and I Gusti Bagus Wiksuana. 2018. "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7 (5): 2592. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Lee, Sarah. 2025. "Cointegration Test Analysis: Unveiling Hidden Relationships in Data."
- Masâ€TMud, Abdul Gafur, and Eny Rochaida. 2022. "Determinan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan." *FORUM EKONOMI* 24 (1): 92. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10393>
- Njonjie, Philep, Grace B. Nangoi, and Hendrik Gamaliel. 2019. "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill* 10 (2): 79. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24955>
- Nurdin, Andi Heny Mulawati. 2018. "Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, Dan Politis Dalam
- Perencanaan Dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota" 4 (1). <http://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JMP/article/view/190>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Okta, Dewi, and David Kaluge. 2011. "Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah." *Journal of Indonesian Applied Economics* 5 (2): 157. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2011.005.02.2>
- Pierson, P. (1993). *When effect becomes cause: Policy feedback and political change*. *World Politics*, 45 (4): 595–628. <https://doi.org/10.2307/2950710>
- Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. *American Political Science Review*, 94 (2): 251–267. <https://doi.org/10.2307/2586011>
- Prasetya, I G.E.D., and I N.M. Yasa. 2020. "The Effect Of VilLage Fund, Pad, And Education On Economic Growth And Poverty Level Of District / City In Bali Province, Indonesia." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 106 (10): 24. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-10.04>
- Purnomo, Sodik Dwi, and Krisnhoe Sukma Danuta. 2022. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Empiris Di Sumatera Utara." *EKONOMIS Journal of Economics and Business* 6 (1): 215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.13>
- Rum, Muh. 2020. "Implikasi Stimulan Insentif Pajak Pada Pertumbuhan Investasi Kabupaten Dan Kota Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro* 3 (2): 99. https://ojs.nitromks.ac.id/index.php/JMP_KN/article/view/31
- Rzemieniak, Magdalena, and Monika Wawer. 2021. "Employer Branding in the Context

- of the Company's Sustainable Development Strategy from the Perspective of Gender Diversity of Generation Z." *Sustainability* 13 (2): 828. <https://doi.org/10.3390/su13020828>
- Sari, Yovita, Aja Nasrun, and Aning Kesuma Putri. 2020. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017." *Equity Jurnal Ekonomi* 8 (1): 1. <https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.9>
- Sasongko, Gatot, Niken Artanti, Andrian Dolfriandra Huruta, and Cheng-Wen Lee. 2020. "Reexamination of Okun's Law: Empirical Analysis from Panel Granger Causality." *Industrija* 48 (4): 63. <https://doi.org/10.5937/industrija48-29455>
- Sepúlveda, C., & Martínez-Vázquez, J. (2011). The consequences of fiskal decentralization on poverty and income inequality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29 (2): 321–343. <https://doi.org/10.1068/c1033r>
- Shojaie, Ali, and Emily B. Fox. 2021. "Granger Causality: A Review and Recent Advances." *Annual Review of Statistics and Its Application*. Annual Reviews. <https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-040120-010930>
- Sireh-Jallow, Abdoulie. 2013. "The Empirics of an Optimal Currency Area in West Africa." *International Journal of Economics and Finance* 5 (4). <https://doi.org/10.5539/ijef.v5n4p100>
- Sjahrir, B.S., Kis-Katos, K., & Schulze, G.G. (2014). Administrative overspending in Indonesian districts: The role of local politics. *World Development*, 59: 166–183. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.008>
- Smith, John, and Jane Doe. 2025. "Granger Causality - an Overview."
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. "Jaring Pengaman Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Journal of Indonesian Economy and Business* 14 (3). <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/39431/22321>
- Supeni, Retno Endah, Agus Yuliantin, and Bayu Wijayantini. 2022. "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat Di Era Pandemi Covid 2019." *National Multidisciplinary Sciences* 1 (1): 11. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i1.4>
- Suryantini, Ni Putu Santi, Ni Putu Ayu Darmayanti, I Made Artha Wibawa, and I Gusti Ketut Gede. 2022. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Provinsi Bali." *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 18 (1): 40. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i1.40-51>
- Syamsul, Syamsul. 2020. "Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018." *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 5 (1): 47. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.17937>
- Syamsuri, Syamsuri. 2021. "Analisis Teori tik Model Pembangunan Daerah (Desa) Tertinggal." *Journal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan* 3 (2): 1. <https://doi.org/10.37304/jispar.v3i2.373>
- Syifa, A., Suhendar, D., & Purnama, D. (2021). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Fiskal Stres pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4965>
- Wijaya, I G.K.D., and Made Suyana Utama. 2020. "The Effect of Economic Growth and Economic Structure of Non-Agriculture on Regional Financial Independence and District/City Human Development Index in the Province of Bali." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 108 (12): 43. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-12.06>
- Yanti, Novi, and Nurtati Nurtati. 2020. "Economic Growth: Impact Of Locally-Generated Revenue And Balance Funds Moderated By Capital Expenditure."

- Jurnal Pembangunan Nagari 5 (1): 40.
<https://doi.org/10.30559/jpn.v5i1.173>
- Zahroh, Afif. 2017. "Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Di Pemerintahan Se-Eks Karesidenan Pati." Accounting Global Journal 1 (1).
<https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3324>